



Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur

Binti Munawaroh^{1*}, Ajeng Wahyuni², Agyl Henggar Pradana³

¹UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, bintimuna1924@gmail.com

²UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, ajeng@iainponorogo.ac.id

³UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, agylhp@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 10, 2025

Revised June 9, 2025

Accepted June 19, 2025

Available online June 28, 2025

*Corresponding author email:
bintimuna1924@gmail.com

Keywords:

GDP, Number of Population,
Regional Taxes, Regional Original
Income.

Abstract

Local Original Income (PAD) in one of the main indicators in assessing the independence and fiscal capacity of a region. This independence can be defined as the extent to which a region is able to finance the implementation of activities and development independently. The main objective of this study is to examine the Effect of Population, PDRB and Regional Taxes on Lokal Original Income (PAD) of East Java. This study uses a quantitative approach with an associative quantitative method with a five-year period, namely 2016-2020. The findings in this study are that individually or partially the population and regional tax variables have a significant effect on regional original income. For the PDRB variable, it partially has no effect on regional original income. While simultaneously the variables of Population, PDRB and Regional Tax have a significant effect on the Original Regional Income of East Java. With that, the government needs to plan developments policies that consider demographic factors so that population growth can be in line with the increase in the regional economy.

DOI: [10.21154/niqosiya.v5i1.4570](https://doi.org/10.21154/niqosiya.v5i1.4570)

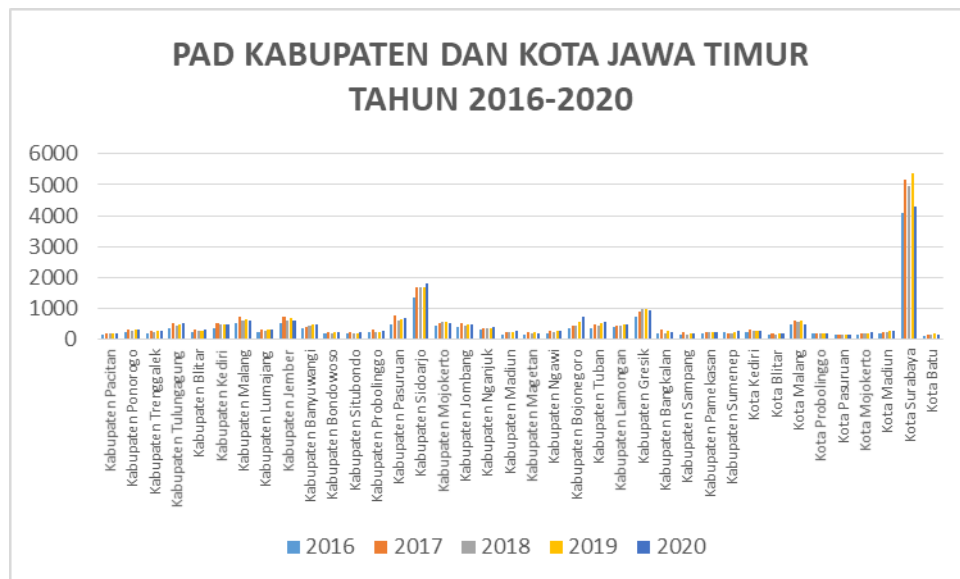
Page: 111-124

Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator utama untuk mengevaluasi kemandirian dan kapasitas fiskal suatu daerah. Kemandirian tersebut dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Sebagai komponen penting untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PAD menggambarkan kekuatan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokalnya guna membiayai operasional pemerintahan serta pembangunan infrastruktur dan layanan public (Syam & Zulfikar, 2022). Dalam konteks desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia, PAD menjadi semakin krusial karena menggambarkan seberapa jauh sebuah daerah mampu mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. PAD yang kuat juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam merancang serta melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu wilayah juga perlu ditingkatkan guna untuk pengembangan pembangunan daerah. Secara umum PAD bersumber utama dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, hal ini telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 Ayat (1) (Riesdi, 2024). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan salah satu indikator utama keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Pratama, 2021). Tingginya PAD di suatu daerah menunjukkan tingginya kemampuan daerah tersebut dalam membiayai kebutuhan operasional dan pembangunannya secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari atasan pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan PAD menjadi sangat penting dan strategis. Peningkatan PAD tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan data sumber Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak se-Jawa yaitu adalah 9 kota dan 29 kabupaten. Sedangkan jumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Dan Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Selain itu, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, PAD kabupaten dan kota Jawa Timur tidak selalu stabil, melainkan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Data historis menunjukkan adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2020, dengan pengecualian pada tahun 2020, di mana PAD mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa PAD sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal tersebut bisa dilihat dari grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Jawa Timur tahun 2016-2020 dibawah ini:



Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Jawa Timur 2016-2022

Grafik tersebut menyajikan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten dan kota Jawa Timur selama periode 2016-2020. Terlihat jelas bahwa Kota Surabaya memiliki PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini wajar karena Surabaya merupakan pusat ekonomi, perdagangan, dan industri terbesar di Jawa Timur, dengan sektor jasa dan perdagangan yang dominan. Kota Malang dan Kota Batu juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, didorong oleh sektor pariwisata dan pendidikan. Sebagian besar kabupaten cenderung memiliki PAD yang relatif stabil, dengan peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Beberapa daerah seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik terlihat memiliki PAD yang lebih tinggi dibanding kabupaten lain. Ini mungkin dipengaruhi oleh aktivitas industri dan perdagangan yang cukup besar di wilayah tersebut. Tahun 2020, yang ditandai dengan pandemi COVID-19, tampak memperlambat pertumbuhan PAD di hampir semua daerah. Namun, Kota Surabaya dan beberapa daerah lainnya masih mampu mempertahankan penerimaan yang cukup tinggi, menunjukkan ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Data ini memberikan gambaran bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur mampu mengatasi tantangan ekonomi dan kembali meningkatkan PAD dalam dua tahun berikutnya. Peningkatan ini penting untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan di daerah, sekaligus menunjukkan stabilitas ekonomi yang mulai pulih setelah dampak pandemi. Menurut Naning terdapat faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam suatu daerah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, pajak daerah, peraturan daerah, system dan pelaporan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk (Fatmawatie, 2016). Menurut Wihana Kirana juga menyebutkan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu perkembangan PDRB, Pertumbuhan penduduk, redistribusi daerah, tingkat inflasi, dan pembangunan (Mahfudh dkk., 2022).

Ketika terjadi penurunan jumlah penduduk biasanya mengakibatkan basis penerimaan daerah menjadi lebih kecil. Dengan menurunnya jumlah penduduk, konsumsi barang dan jasa pun cenderung menurun, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan dari pajak konsumsi seperti pajak restoran, hotel, dan hiburan. Selain itu, jumlah penduduk yang menurun juga berarti basis wajib pajak menjadi lebih kecil, baik dari segi individu maupun badan usaha. Dampak ini secara langsung dapat mengurangi potensi pendapatan pemerintah daerah. Begitupun sebaliknya, peningkatan jumlah penduduk juga dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini, pada gilirannya berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah, mengingat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi biasanya menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah tersebut akan meningkat, hal ini sejalan dengan teori Malthus ([Rapanna & Sukarno, 2017](#)). Penelitian yang dilakukan oleh [Yeni Kurniawati \(2014\)](#) di Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ([Gitaningtyas, 2014](#)). Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian [Aris Adi Prasetyo et al \(2022\)](#) menunjukkan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak terpengaruhnya jumlah penduduk terhadap PAD diduga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ([Prasetyo dkk., 2022](#)).

Faktor lain yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah PDRB. Menurut Juli Panglima Saragih juga mengatakan jika semakin meningkat penghasilan masyarakat maka akan semakin tinggi juga kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai tarif/pungutan yang ditetapkan pemerintah sehingga akan meningkatkan PAD ([Saragih, 2003](#)). Selain itu untuk melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah dengan melihat PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka secara langsung akan berakibat pada kenaikan sektor-sektor pembentuk PDRB, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut ([Mongdong dkk., 2018](#)). Penurunan PDRB juga menunjukkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. PDRB adalah indikator utama yang mencerminkan kemampuan ekonomi daerah. Ketika PDRB menurun, hal ini berarti nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, dan jasa mengalami penurunan. Akibatnya, penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah ikut terpengaruh. Dalam kondisi ini, daya beli masyarakat dan pelaku usaha juga melemah, sehingga berkontribusi pada turunnya penerimaan PAD. [Ashabul Hikam \(2024\)](#) dalam penelitiannya menemukan hasil secara parsial variabel PDRB berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pendapatan asli daerah ([Hikam, 2024](#)). Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan antara variabel produk domestik regional bruto dengan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh [Sri Andini dan Husni Shabr \(2024\)](#) membuktikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ([Andini & Shabri, 2024](#)).

Menurut Mustaqiem Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Mustaqiem, 2008). Pajak daerah juga merupakan komponen terbesar dalam PAD, meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, dan pajak restoran. Dalam hal ini tentu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan pendapatan asli daerah. Ketika pajak daerah menurun, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang menjadi dasar pengenaan pajak melemah. Penurunan ini juga bisa terjadi akibat kebijakan fiskal daerah yang kurang efektif atau tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Dari hasil penelitian ditemukan oleh Ikshan Ridho Nugroho dan Kurnia (2020) bahwasannya Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Nugroho & Kurnia, 2020). Hasil temuan tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian Sari (2019) yang menjelaskan bahwa pajak daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Sari, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwasannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sejalan dengan penurunan Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pajak Daerah yang mengalami fluktuasi. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur”. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak penelitian sebelumnya hanya menggunakan PDRB dan Jumlah Penduduk sebagai variabel independen. Sedangkan dalam penelitian ini menambahkan Pajak Daerah sebagai variabel independen karena pada dasarnya Pajak Daerah juga berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari sumber BPS dan APBD sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan penemuan baru melalui langkah-langkah statistik maupun melalui perhitungan (Sugiyono, 2022). Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 29 kabupaten dan 9 kota pada tahun 2016-2020. Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan APBD Jawa Timur yang mempublikasikan data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pajak Daerah seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020. Sekaligus teknik pengolahan data penelitian ini menggunakan bantuan eviews 13 dengan teknik analisis regresi data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder BPS dan APBD, maka serangkaian pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa uji pemilihan metode regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data Jumlah Penduduk, PDRB dan Pajak Daerah sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	PAD	Jumlah Penduduk	PDRB	Pajak Daerah
Mean	489.5621	1043336.	567877.00	231.6041
Median	272.9450	1028446.	29648.60	81.11000
Maximum	5381.920	2896195.	580488.5	4018.720
Minimum	109.5300	126404.0	5331.300	16.59000
Std. Dev.	762.7256	656572.0	87670.66	575.9429
Skewness	4.982243	0.953945	4.201175	5.252916
Kurtosis	28.92762	3.864264	22.80492	31.19436
Jarque-Bera	6107.965	34.73038	3664.105	7166.916
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	93016.80	1.98E+08	10789529	44004.77
Sum Sq. Dev.	1.10E+08	8.15E+13	1.45E+12	62693230
Observations	190	190	190	190

Sumber: Hasil data diolah Eviews 13

Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai minimumnya sebesar 109.5300 dan nilai maksimumnya sebesar 5381.920. Dan untuk Jumlah Penduduk mempunyai nilai minimum sebesar 126404.0 dengan nilai maksimumnya sebesar 2896195. Selain itu terlihat juga PDRB nilai minimumnya sebesar 5331.30 dan nilai maksimumnya sebesar 580488,5. Sedangkan pada Pajak Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 4018.720 dengan nilai minimumnya sebesar 16.59000.

2. Uji Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Pada uji ini akan ditentukan model mana yang paling tepat untuk penelitian tersebut. Dalam regresi data panel terdapat uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* guna mengetahui model yang tepat untuk penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section</i>	17.799237	(37,149)	0.000
<i>Cross-section Chi-square</i>	321.116267	37	0.000

Sumber: Hasil data diolah Eviews 13

Berdasarkan hasil uji *chow* diatas, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000 yang dimana nilainya lebih rendah dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti model *Common Effect* ditolak dan model *Fixed Effect* diterima. Oleh karena itu, dalam estimasi ini model *Fixed Effect* lebih sesuai dan lebih baik dibandingkan dengan model *Common Effect*.

Tabel 3. Hasil Uji Hasuman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	1.131831	3	0.7694

Sumber: Hasil data diolah Eviews 13

Berdasarkan hasil uji *hausman* tersebut diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,7694 yang dimana nilainya diatas 0,05 ($0,7694 > 0,05$). Sehingga, berdasarkan hasil uji yang dilakukan dapat diputuskan bahwa H_0 diterima yang berarti model *Random Effect* dapat diterima dan sebaliknya model *Fixed Effect* tidak dapat diterima atau ditolak. Maka model yang terbaik dalam estimasi ini *Random Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	<i>Test Hypothesis</i>		
	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	223.3950 (0.0000)	0.556454 (0.0105)	229.9515 (0.0000)

Sumber: Hasil data diolah Eviews 13

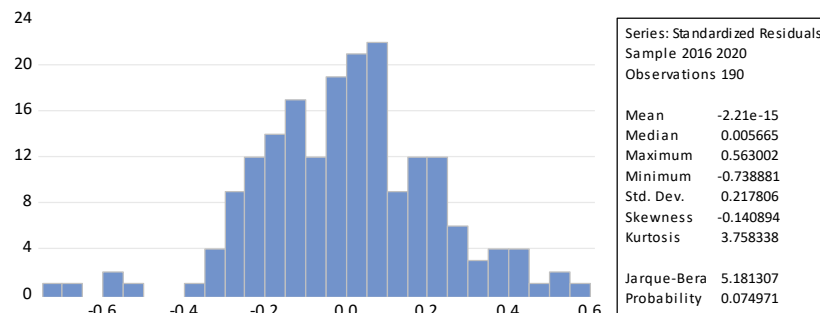
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil uji *lagrange multiplier*. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *Breusch-Pagan* untuk *cross-section* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga model *Random Effect* lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa model terbaik yang terpilih adalah model FEM, sementara berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan model yang terpilih adalah model REM. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat untuk uji pemilihan metode regresi data panel ini adalah model REM.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Basuki dan Prawoto, Pengujian autokorelasi pada data yang bukan time series, baik data cross section maupun data panel, hanya akan sia-sia semata atau tidaklah berarti (Basuki & Prawoto, 2017). Walaupun ada data runtut waktu (*time series*) dalam data panel ini, namun bukan merupakan time series murni (waktu yang tidak berulang). Oleh karena itu, pengujian autokolerasi tidak dilakukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa untuk variabel independen tertentu tidak terdapat masalah autokolerasi atau kolerasi serial diantara faktor gangguan. Berdasarkan hal tersebut,

penelitian ini hanya melakukan tiga jenis uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,074971 yang artinya lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ($0,074971 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	Jumlah Penduduk	PDRB	Pajak Daerah
LOG(Jumlahpenduduk)	1.000000	0.738392	0.532347
LOG(PDRB)	0.738392	1.000000	0.857659
LOG(Pajak_Daerah)	0.532347	0.857659	1.000000

Sumber: Hasil data diolah Eviews 13

Uji multikolinearitas dilakukan guna untuk melihat besarnya nilai koefisien kolerasi semua variabel independen. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika nilai kolerasi antara Jumlah Penduduk dan PDRB sebesar 0,738392. Nilai kolerasi antara Jumlah Penduduk dan Pajak Daerah sebesar 0,532347. Sedangkan nilai kolerasi antara PDRB dan Pajak Daerah sebesar 0,857659. Dapat diketahui bahwa semua data kurang dari 0,90 ($< 0,90$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.545935	1.804489	0.0728
LOG(Jumlah_Penduduk)	-0.055486	-1.741568	0.0832
LOG(PDRB)	0.016795	0.406031	0.6852
LOG(Pajak_Daerah)	0.044283	1.546275	0.1237

Sumber: Hasil data diolah Eviews 13

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, memiliki nilai Prob sebesar 0,0832, variabel PDRB mempunyai nilai Prob sebesar 0,6852 dan untuk variabel Pajak Daerah memiliki nilai Prob sebesar 0,1237. Dari hasil tersebut diketahui

bahwa nilai Probabilitas variabel Jumlah Penduduk, PDRB dan Pajak Daerah memiliki nilai Prob yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa semua variabel independen tersebut tidak berpengaruh pada nilai mutlak residual. Sehingga dapat disimpulkan model yang terbentuk tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji T Statistik

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	0.179243	0.296482	0.7672
LOG(Jumlah_Penduduk)	0.227233	3.368745	0.0004
LOG(PDRB)	0.023544	0.304154	0.7614
LOG(Pajak_Daerah)	0.503073	9.839050	0.0000

Sumber: Hasil data diolah Eviews 13

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diuraikan persamaan data panel sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 0,179243 + 0,227233 * \text{Jumlah Penduduk} + 0,023544 * \text{PDRB} + 0,503073 * \text{Pajak Daerah}.$$

- Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan positif yaitu 0,179243, hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel Jumlah Penduduk, PDRB dan Pajak Daerah, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,179243 milyar rupiah.
- Koefisien variabel Jumlah Penduduk bernilai 0,227233. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. Artinya apabila Jumlah Penduduk meningkat maka PAD akan mengalami peningkatan juga. Dalam hal ini jika Jumlah Penduduk meningkat 1 jiwa akan menaikkan PAD sebesar 0,227233 milyar rupiah.
- Nilai Koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) menunjukkan sebesar 0,023544. Dapat diartikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) mempunyai pengaruh positif terhadap PAD. Artinya, PDRB meningkat maka PAD juga akan meningkat. Lebih jauh, jika PDRB meningkat 1 milyar rupiah maka PAD akan meningkat sebesar 0,023544 milyar rupiah.
- Nilai Koefisien variabel Pajak Daerah sebesar 0,503073. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Dapat diartikan jika Pajak Daerah meningkat maka PAD juga akan mengalami peningkatan. Lebih jauh, apabila Pajak Daerah meningkat sebesar 1 milyar rupiah maka PAD akan meningkat sebesar 0,503073 milyar rupiah.

Tabel 7. Hasil Uji F Statistik

Variabel	Prob.
F-Stat	0.000000

Sumber: Hasil data diolah Eviews 13

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut diperoleh nilai Prob (F-Statistik) sebesar 0,000000. Nilai ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hipotesis

alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Jadi jumlah penduduk, pdrb, dan pajak daerah secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah jawa timur.

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi (R^2)

R-squared	0.738752
Adjusted R-squared	0.734538

Sumber: Hasil data diolah Eviews 13

Pada tabel diatas dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0,73872 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mencapai 73,87%, sementara 26,13% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model. Artinya variabel Jumlah Penduduk, PDRB dan Pajak Daerah sebesar 73,87% dapat memprediksi Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya sebesar 26,13% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai prob dari t statistik sebesar $0,0004 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien regresinya sebesar 0,227233 yang artinya Jumlah Penduduk mempunyai arah pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana semakin meningkat Jumlah Penduduk maka PAD akan semakin meningkat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan [Ria Aprilia Purbaya, Ahmad Syarief dan Mia Rosmiati \(2021\)](#), menyatakan bahwa secara parsial menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi ([Purbaya dkk., 2021](#)). Selain penelitian yang dilakukan oleh Yeni Kurniawati Gitaningtyas et al (2014) di Provinsi Jawa Timur juga menghasilkan penemuan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD ([Gitaningtyas, 2014](#)).

Dalam hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Maltrus yang mengatakan bahwasannya pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari adanya proses pembangunan yang artinya pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding ([Rapanna & Sukarno, 2017](#)). Dimana jika jumlah penduduk semakin meningkat dan diimbangi dengan peningkatan produksi dan distribusi serta pembangunan maka hal ini juga akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan seperti itu penting bagi pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Jika jumlah penduduk meningkat, tetapi kesejahteraan tidak ditingkatkan secara proporsional, maka dampaknya terhadap PAD bisa berkurang. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengimplementasikan kebijakan yang bukan hanya menargetkan pertumbuhan jumlah penduduk tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui akses pendidikan, pelatihan kerja, dan peluang bisnis dapat menciptakan basis ekonomi yang lebih kuat untuk meningkatkan PAD. Selain itu pemerintah harus bersikap

proaktif dalam merencanakan pembangunan yang memperhitungkan faktor demografis, ekonomi, dan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah.

Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan besar nilai koefisien regresi dari PDRB adalah 0,023544 ini artinya PDRB memiliki pengaruh arah positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk variabel PDRB diperoleh nilai Probabilitas t statistik sebesar 0,7614 > 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian Yosephina, Fendy dan Septian tahun 2023 yang menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi NTB. Penelitian tersebut mengatakan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dikarenakan adanya indikasi bahwasanya pembangunan perekonomian di NTB masih minim, adapun salah satu faktor penyebabnya yaitu faktor alam terjadinya gempa tahun 2018 di kabupaten wilayah Lombok (Goban dkk., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Haiqal dan Bambang (2024) juga membuktikan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak dipengaruhi oleh PDRB. Hal ini diduga disebabkan oleh dominasi sektor pertanian sebagai sektor perekonomian terbesar, yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap PAD. Pendapatan dari penjualan dan ekspor hasil pertanian hanya berkontribusi pada pajak penghasilan, pajak ekspor, dan pajak pertambahan nilai, yang menurut undang-undang menjadi bagian dari pendapatan pemerintah pusat (Imansyah & Sambodo, 2024).

Dalam teori Juli Panglima Saragih mengatakan jika semakin tinggi pendapatan masyarakat maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah (Saragih, 2003). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PDRB yang didapatkan maka akan semakin tinggi juga potensi penerimaan daerah. Sehingga dengan adanya peningkatan PDRB dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada di Jawa Timur yang dimana PDRB tidak dipengaruhi oleh PAD. Tidak berpengaruhnya PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut karena bergantungnya ekonomi daerah Jawa Timur terhadap produk impor, yang dimana untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk diimpor langsung dari luar daerah bahkan luar negeri. Sehingga mengurangi peran sektor produksi lokal dalam menciptakan nilai tambah yang dapat meningkatkan PAD, karena pendapatan dari pajak dan bea cukai lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pada variabel Pajak Daerah diperoleh bahwa nilai prob dari t statistik sebesar 0,0000 < 0,05 ($\alpha = 5\%$) sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a . Dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah dengan koefisien regresinya sebesar 0,503073 yang artinya apabila Pajak Daerah mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 1 milyar rupiah maka akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,503073 milyar

rupiah. Hasil ini sesuai temuan Jaeni dan Saktiyana Nurcahyani pada penelitiannya di tahun 2023. Dimana mereka mengungkapkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Jaeni & Nurcahyani, 2023).

Hal ini sesuai menurut Mustaqiem yang dimana Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Mustaqiem, 2008). Pajak daerah juga merupakan komponen terbesar dalam PAD, meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, dan pajak restoran. Dalam hal ini tentu Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan Pendapatan Asli Daerah. Jika penerimaan pajak daerah naik tentunya penerimaan pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan begitupun sebaliknya. Jika pendapatan asli daerah menurun penerimaan pajak daerah juga akan menurun.

Sebagai salah satu sumber utama PAD, penerimaan dari pajak daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak dana untuk membiayai program-program pembangunan yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah yang efisien dan efektif sangat penting untuk memastikan kelancaran arus kas daerah. Peningkatan pendapatan dari pajak daerah dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor lain yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan pajak daerah akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan nilai Prob (F-Statistik) yang sebesar 0,000000, dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi (kurang dari 0,05). Artinya variabel Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pajak Daerah secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur. Sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a dengan koefisien determinasi sebesar 0,73872 menunjukkan bahwa 73,87% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sementara 26,13% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini didukung penelitian lain yang dilakukan oleh Rivo Bagus Saputra (2021). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Saputra, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Variabel Jumlah Penduduk secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya nilai probabilitas dari statistik t sebesar $0,0004 < 0,05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien regresi yang bernilai 0,227233 yang artinya Jumlah Penduduk memiliki arah pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana semakin meningkat Jumlah Penduduk maka PAD juga akan semakin meningkat.

2. Variabel PDRB secara individu tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut karena nilai prob t statistik sebesar $0,7614 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil tersebut maka kesimpulannya bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan hasil nilai koefisien regresi pada PDRB adalah 0,023544 yang berarti PDRB memiliki pengaruh arah positif juga terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Secara parsial pada variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa nilai prob dari t statistik sebesar $0,0000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a . Kesimpulannya bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien regresi sebesar 0,503073 yang artinya apabila Pajak Daerah mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 1 milyar rupiah maka juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,503073 milyar rupiah.
4. Secara simultan variabel Jumlah Penduduk, PDRB dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur. Hal ini dapat diketahui dari nilai prob f statistik sebesar 0,0000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh lebih kecil daripada tingkat signifikan yang ditetapkan ($< 0,05$).

REFERENSI

- Andini, S. M., & Shabri, H. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 62–76.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 297. PT. Rajagrafindo Persada.
- Fatmawatie, N. (2016). *Otonomi Daerah Dan Pendapatan Daerah*. STAIN Kediri Press.
- Gitaningtyas, Y. K. (2014). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*.
- Goban, Y. T., Maradita, F., & Hidayat, M. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021. *Jurnal Enterprenuer dan Ekonomi*, 1(1), 9–23.
- Hikam, A. (2024). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022* [Skripsi]. Uin Sunan Ampel.
- Imansyah, H., & Sambodo, B. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Wisatawan Nusantara Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *ULIL*

- ALBAB : *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(9), Article 9.
<https://doi.org/10.56799/jim.v3i9.4917>
- Jaeni, J., & Nurcahyani, S. (2023). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERASI SEBELUM DAN MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 497–520.
- Mahfudh, Saleh, H., & Muhammad Yusuf, S. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Pusaka Almaida.
- Mongdong, C. M., Masinambow, V. A., & Tumangkeng, S. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5).
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah*. FH UII Press.
- Nugroho, I. R., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 37–56.
- Pratama, F. W. (2021). Analisis peranan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten wonogiri. *Inisiasi*, 103–114.
- Purbaya, R. A., Syarief, A., & Rosmiati, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi Tahun 2010-2019. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 457–465.
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. CV.SAH MEDIA.
- Riesdi, M. A. (2024). Analisis pendapatan asli daerah (PAD) untuk menilai kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2022. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 14–33.
- Saputra, R. (2021). Analisis Perkembangan Pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2).
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, W. P. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah:(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *Jurnal Equilibrium Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti*, 5(2), 12–19.
- Sugiyono. (2022). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>